
Ekowisata Versus Wisata Ekonomis Pantai Natsepa Ambon

David Octovianus Roos¹⁾ & Ali Hadi Ladimuru²⁾

^{1,2)} STIA Alazka, Ambon, Maluku, Indonesia

dvdroos03@gmail.com

Submitted: 2026-04-22

Accepted : 2026-06-27

Published : 2026-06-29

Abstract

The increasing use of the ecotourism label for nature-based destinations has created conceptual ambiguity, as many destinations prioritize economic benefits without fully implementing the principles of sustainable tourism. This study examines whether the management of Natsepa Beach in Central Maluku Regency, Indonesia, reflects the characteristics of ecotourism or is more appropriately classified as economic tourism. A qualitative case study approach was employed through field observations, semi-structured interviews with 20 informants representing government officials, destination managers, local vendors, and visitors, complemented by document analysis. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman with source and method triangulation. The findings indicate that although Natsepa Beach possesses significant natural and cultural tourism potential and provides economic benefits for local communities, its management has not adequately implemented environmental conservation, visitor carrying capacity, environmental education, or collaborative governance. Consequently, the destination is more appropriately classified as economic tourism rather than true ecotourism. This study contributes to ecotourism theory by emphasizing that the classification of nature-based tourism destinations should be determined by the implementation of sustainable governance principles rather than natural attractions alone. The findings provide practical insights for developing more sustainable coastal tourism management.

Keywords: *Ecotourism, Economic Tourism, Sustainable Tourism, Destination Governance, Coastal Tourism*

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah di Indonesia (Ubjaan Jusak & Sipahelut S.W., 2022). Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong peningkatan daya saing destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, orientasi pengembangan pariwisata juga mengalami perubahan. Wisatawan tidak lagi hanya mencari pengalaman rekreasi, tetapi juga memperhatikan aspek konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Perubahan preferensi tersebut mendorong berkembangnya konsep ekowisata sebagai paradigma pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan (Tafalas, 2010).

Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang berlandaskan pada prinsip konservasi sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Berbeda dengan

pariwisata konvensional yang umumnya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, ekowisata menempatkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pengelolaan destinasi. Tafalas, (2010) menjelaskan bahwa ekowisata mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Senada dengan itu, Damanik dan Weber, (2006) menjelaskan bahwa ekowisata dapat dipahami sebagai produk wisata berbasis sumber daya alam, sebagai pasar yang mendorong perjalanan berbasis konservasi, dan sebagai pendekatan pengelolaan yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya pariwisata.

Perkembangan literatur internasional menunjukkan bahwa penelitian mengenai ekowisata tidak lagi terbatas pada pembahasan mengenai konservasi lingkungan dan manfaat ekonomi, tetapi telah berkembang ke arah pengelolaan destinasi secara berkelanjutan melalui pengaturan daya dukung kawasan (*tourism carrying capacity*), pengelolaan pengunjung (*visitor management*), tata kelola destinasi (*destination governance*), serta perlindungan ekosistem. Butler, (2020) menegaskan bahwa konsep *tourism carrying capacity* kembali menjadi perhatian utama dalam penelitian pariwisata karena meningkatnya fenomena *overtourism* di berbagai destinasi wisata dunia. Selanjutnya, Jianpu Li dkk., (2021) menunjukkan bahwa penelitian mengenai *tourism carrying capacity* telah berkembang pesat, namun masih didominasi oleh kajian konseptual dan pengembangan model pengukuran, sementara penelitian empiris mengenai implementasinya pada pengelolaan destinasi masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola menjaga keseimbangan antara aktivitas wisata, kapasitas lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, dan kualitas pengalaman wisatawan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih didominasi oleh pengembangan model konseptual, metode pengukuran daya dukung kawasan, serta evaluasi pengelolaan destinasi pada kawasan konservasi, taman nasional, dan kawasan lindung. Sebaliknya, penelitian empiris yang secara khusus mengevaluasi apakah suatu destinasi wisata pesisir telah benar-benar dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekowisata atau masih berorientasi pada peningkatan manfaat ekonomi relatif masih terbatas, khususnya pada destinasi wisata di wilayah kepulauan. Selain itu, kajian sistematis yang dilakukan oleh Zamru Ajuhari dkk., (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai *carrying capacity* masih berfokus pada pengembangan metode penilaian, sedangkan integrasi antara daya dukung kawasan, kebijakan pengelolaan destinasi, dan implementasi prinsip-prinsip ekowisata belum banyak dievaluasi secara komprehensif. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya membahas konsep ekowisata secara normatif, tetapi juga mengevaluasi implementasinya dalam praktik pengelolaan destinasi wisata.

Pantai Natsepa di Pulau Ambon merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Provinsi Maluku yang dikenal karena keindahan pantainya serta kuliner khas berupa rujak buah, sagu gula, dan bagea suli. Destinasi ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat melalui sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro berbasis

pariwisata. Namun demikian, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, terutama pada musim liburan sekolah, hari raya keagamaan, dan akhir pekan, juga menimbulkan berbagai tekanan terhadap lingkungan kawasan pesisir. Permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya volume sampah, terganggunya kebersihan kawasan pantai, potensi kerusakan vegetasi pesisir, serta belum tersedianya mekanisme pengendalian jumlah pengunjung sesuai kapasitas kawasan.

Dalam perspektif ekowisata, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pengelolaan yang berkelanjutan menuntut adanya pengendalian daya dukung kawasan, pengaturan jumlah pengunjung, penyediaan infrastruktur lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Sebaliknya, destinasi yang lebih menekankan orientasi ekonomi tanpa mempertimbangkan kapasitas lingkungan berpotensi mengalami penurunan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perbedaan antara pengelolaan berbasis ekowisata dan pengelolaan yang berorientasi ekonomi menjadi isu yang penting untuk dikaji, khususnya pada destinasi wisata pesisir yang mengalami peningkatan intensitas kunjungan wisatawan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama penelitian ini adalah belum jelasnya orientasi pengelolaan Pantai Natsepa, apakah telah mencerminkan prinsip-prinsip ekowisata atau masih didominasi oleh pendekatan yang berorientasi pada peningkatan manfaat ekonomi. Ketidakjelasan tersebut tercermin dari belum adanya kebijakan yang secara eksplisit mengatur daya dukung kawasan, pembatasan jumlah pengunjung, maupun mekanisme pengelolaan lingkungan yang terintegrasi sebagai bagian dari pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perbedaan konseptual antara ekowisata dan pariwisata yang berorientasi ekonomi, (2) mengidentifikasi karakteristik pengelolaan Pantai Natsepa berdasarkan prinsip-prinsip ekowisata, dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan Pantai Natsepa secara lebih berkelanjutan melalui penerapan prinsip konservasi, pengendalian daya dukung kawasan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Ekowisata

Konsep ekowisata pertama kali diperkenalkan sebagai respons terhadap dampak negatif pembangunan pariwisata konvensional yang cenderung mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Hetzer, (1965) merupakan salah satu tokoh awal yang memandang ekowisata sebagai pendekatan alternatif yang menyeimbangkan kepentingan konservasi, penghormatan terhadap budaya lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta kepuasan wisatawan. Pandangan tersebut menjadi dasar berkembangnya paradigma pariwisata berkelanjutan yang saat ini banyak diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata alam.

Seiring dengan perkembangan kajian ekowisata, Damanik dan Weber, (2006) mengelompokkan konsep ekowisata ke dalam tiga perspektif utama. Pertama, ekowisata sebagai

produk, yaitu seluruh daya tarik wisata yang berbasis pada sumber daya alam. Kedua, ekowisata sebagai pasar (*market*), yaitu aktivitas perjalanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan upaya konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Ketiga, ekowisata sebagai pendekatan pengembangan (*development approach*), yaitu strategi pengelolaan destinasi yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemanfaatan sumber daya wisata secara bertanggung jawab. Dari ketiga perspektif tersebut, pendekatan pengembangan menjadi landasan yang paling relevan dalam penelitian ini karena menekankan bagaimana suatu destinasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, bukan semata-mata berdasarkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Literatur terkini menunjukkan bahwa konsep ekowisata telah berkembang dari sekadar konservasi menuju pendekatan tata kelola destinasi yang berkelanjutan. Pengelolaan destinasi tidak lagi hanya menekankan perlindungan lingkungan, tetapi juga mencakup pengendalian daya dukung kawasan (*tourism carrying capacity*), pengelolaan jumlah pengunjung (*visitor management*), partisipasi masyarakat, serta keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, keberhasilan implementasi ekowisata tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah wisatawan atau pendapatan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan pengelola mempertahankan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Butarbutar, (2021) menjelaskan bahwa implementasi ekowisata harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu: (1) berbasis pada potensi wisata alam; (2) mendukung kegiatan konservasi; (3) menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan; (4) memberikan nilai edukasi kepada wisatawan; (5) menghormati budaya dan kearifan lokal; serta (6) memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Keenam prinsip tersebut menunjukkan bahwa ekowisata bukan hanya merupakan bentuk kegiatan wisata, melainkan suatu sistem pengelolaan destinasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara seimbang.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan destinasi wisata juga didukung oleh kerangka regulasi nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, serta nilai yang berasal dari kekayaan alam, budaya, maupun hasil karya manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Definisi tersebut menegaskan bahwa sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya buatan merupakan aset yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, namun pemanfaatannya tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar nilai ekologis dan sosialnya tetap terjaga.

Berdasarkan sintesis teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa karakteristik utama yang membedakan ekowisata dengan wisata yang berorientasi ekonomi terletak pada orientasi pengelolaannya. Ekowisata menempatkan konservasi lingkungan, pengendalian daya dukung kawasan, partisipasi masyarakat lokal, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama, sedangkan wisata yang berorientasi ekonomi lebih menitikberatkan pada peningkatan jumlah kunjungan dan manfaat

ekonomi. Perspektif inilah yang digunakan sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi orientasi pengelolaan Pantai Natsepa dalam penelitian ini

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan Pantai Natsepa di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena pengelolaan destinasi wisata secara komprehensif dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nyata. Pantai Natsepa dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu destinasi wisata bahari utama di Provinsi Maluku yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor pariwisata dengan upaya pelestarian lingkungan pesisir. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi orientasi pengelolaan Pantai Natsepa, apakah lebih mencerminkan prinsip-prinsip ekowisata atau masih didominasi oleh pendekatan yang berorientasi pada manfaat ekonomi.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Untuk mendukung proses tersebut digunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, kamera digital, dan alat perekam suara. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan wisata. Sebanyak 20 informan terdiri atas unsur pemerintah daerah, pengelola kawasan wisata, pelaku usaha atau pedagang, serta wisatawan yang dipandang memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik kawasan, aktivitas wisata, serta praktik pengelolaan lingkungan di Pantai Natsepa. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan para informan mengenai implementasi prinsip-prinsip ekowisata dalam pengelolaan destinasi. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen pendukung, seperti data kunjungan wisatawan, regulasi daerah, laporan pengelolaan kawasan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan mengorganisasi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, tata kelola destinasi, serta implementasi prinsip-prinsip ekowisata. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel komparatif, dan dokumentasi visual untuk mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui proses

verifikasi secara berulang dengan membandingkan berbagai sumber data sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibel mengenai kecenderungan orientasi pengelolaan Pantai Natsepa, apakah lebih mencerminkan prinsip-prinsip ekowisata atau pendekatan pariwisata yang berorientasi pada manfaat ekonomi.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian sebelum wawancara dilaksanakan, dan partisipasi mereka dilakukan secara sukarela. Identitas informan dijaga kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan akademik sesuai dengan prinsip etika penelitian sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pantai Natsepa sebagai Destinasi Wisata

Pantai Natsepa terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Meskipun secara geografis berada di Pulau Ambon, destinasi ini secara administratif dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kondisi tersebut menciptakan karakteristik tata kelola yang unik karena pengambilan keputusan terkait pengelolaan destinasi dilakukan oleh pemerintah daerah yang berada di luar wilayah Kota Ambon, yang merupakan sumber utama kunjungan wisatawan. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam koordinasi antarinstansi, terutama dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan kawasan wisata.

Dari aspek sumber daya alam, Pantai Natsepa memiliki potensi wisata yang sangat besar. Kawasan pantai memiliki perairan yang relatif tenang karena terlindungi oleh gugusan pulau-pulau kecil di Teluk Ambon, sehingga sangat sesuai untuk aktivitas rekreasi keluarga, terutama berenang. Selain keindahan panorama pesisir, Pantai Natsepa juga dikenal luas sebagai destinasi wisata kuliner melalui sajian khas seperti rujak buah Natsepa, sagu gula, bagea suli, dan pisang goreng yang dipasarkan oleh masyarakat lokal, khususnya dari Negeri Suli, Waiyari, dan desa-desa di sekitarnya. Keberadaan kuliner lokal tersebut telah berkembang menjadi identitas utama destinasi dan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat.

Namun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa aktivitas wisata di Pantai Natsepa masih didominasi oleh kegiatan rekreasi dan konsumsi kuliner. Belum ditemukan adanya program interpretasi lingkungan, kegiatan konservasi berbasis wisata, maupun aktivitas edukatif yang dapat meningkatkan pemahaman wisatawan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman wisata yang ditawarkan masih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam sebagai objek rekreasi, bukan sebagai media pembelajaran lingkungan sebagaimana menjadi karakter utama ekowisata.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa identitas Pantai Natsepa saat ini lebih dibangun berdasarkan fungsi ekonominya sebagai kawasan wisata bahari dan kuliner dibandingkan sebagai destinasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Di satu sisi, orientasi ini telah membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan tanpa diikuti sistem pengelolaan lingkungan yang memadai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan kawasan wisata pada masa mendatang.

Evaluasi Pantai Natsepa Berdasarkan Komponen Produk Wisata

Kualitas suatu destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam yang dimiliki, tetapi juga oleh keterpaduan berbagai komponen produk wisata. Mengacu pada kerangka yang dikemukakan oleh Inskeep, (1991), penelitian ini mengevaluasi Pantai Natsepa berdasarkan tiga komponen utama, yaitu daya tarik (*attraction*), fasilitas (*facility*), dan aksesibilitas (*accessibility*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen daya tarik merupakan kekuatan utama Pantai Natsepa. Destinasi ini menawarkan panorama pesisir yang indah, perairan yang tenang dan aman untuk aktivitas rekreasi keluarga, serta kekayaan kuliner lokal yang telah menjadi ikon wisata di Maluku. Berbeda dengan banyak destinasi pantai lainnya yang hanya mengandalkan keindahan alam, Pantai Natsepa memiliki kombinasi daya tarik alam dan budaya yang memberikan pengalaman wisata yang lebih beragam. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa destinasi ini belum dilengkapi dengan atraksi pendukung seperti jalur interpretasi lingkungan, pertunjukan budaya, fasilitas edukasi, maupun wahana rekreasi yang mampu memperkaya pengalaman wisatawan.

Pada aspek fasilitas, penelitian menemukan bahwa sarana pendukung wisata masih relatif terbatas. Beberapa fasilitas dasar seperti toilet umum dan area parkir memang telah tersedia, namun kualitas maupun jumlahnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan wisatawan, terutama pada periode kunjungan yang tinggi. Sistem penjualan tiket masih dilakukan secara manual, sementara fasilitas penting seperti pusat informasi wisata, layanan kesehatan, pos keamanan, maupun sistem pelayanan pengunjung belum tersedia secara memadai. Permasalahan yang paling menonjol adalah masih minimnya fasilitas pengelolaan sampah. Tempat sampah belum tersedia secara merata di sepanjang kawasan pantai maupun di sekitar area pedagang, sehingga sampah wisatawan cenderung menumpuk pada waktu-waktu tertentu.

Dari aspek aksesibilitas, Pantai Natsepa memiliki kondisi yang relatif baik. Lokasi wisata dapat dijangkau dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum dari Kota Ambon. Kemudahan akses ini menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya jumlah kunjungan wisatawan. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa belum tersedia sistem transportasi wisata yang terintegrasi maupun pelayanan khusus bagi wisatawan mancanegara. Selain itu, kemampuan komunikasi petugas lapangan dalam menggunakan bahasa asing masih terbatas sehingga dapat memengaruhi kualitas pelayanan terhadap wisatawan internasional.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pantai Natsepa memiliki modal wisata yang sangat kuat dari sisi sumber daya alam dan budaya lokal. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kualitas fasilitas dan sistem pengelolaan destinasi yang memadai. Ketidakseimbangan antara daya tarik wisata dengan kapasitas pengelolaan inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan lingkungan dan pelayanan wisata yang ditemukan selama penelitian. Dengan kata lain, tantangan utama Pantai Natsepa bukan terletak

pada kurangnya potensi wisata, melainkan pada belum optimalnya tata kelola destinasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Mengapa Pantai Natsepa Belum Dapat Dikategorikan sebagai Destinasi Wisata

Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi apakah pengelolaan Pantai Natsepa telah mencerminkan prinsip-prinsip ekowisata atau masih berorientasi pada pariwisata alam konvensional yang menitikberatkan pada aktivitas ekonomi. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini mengevaluasi kondisi Pantai Natsepa berdasarkan prinsip-prinsip ekowisata yang dikemukakan oleh Fennell, (2003) serta Wallace dan Pierce, yang meliputi konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dan pengelolaan pengunjung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Natsepa belum memenuhi sebagian besar karakteristik utama destinasi ekowisata. Meskipun memiliki sumber daya alam yang menarik dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, pola pengelolannya masih didominasi oleh aktivitas rekreasi dan kegiatan komersial. Program konservasi lingkungan, edukasi bagi wisatawan, interpretasi lingkungan, maupun sistem pengelolaan pengunjung belum menjadi bagian integral dari tata kelola destinasi.

Temuan yang paling menonjol adalah lemahnya pengelolaan lingkungan. Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah masih sangat terbatas, perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan terutama pada musim liburan, dan belum terdapat sistem pemantauan lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan pariwisata di Pantai Natsepa masih lebih berorientasi pada pemanfaatan ekonomi daripada perlindungan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fennell (2003) yang menegaskan bahwa konservasi merupakan unsur utama yang membedakan ekowisata dari bentuk pariwisata alam lainnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa aspek pengelolaan pengunjung belum mendapat perhatian yang memadai. Tidak ditemukan kebijakan mengenai pembatasan jumlah pengunjung, sistem zonasi kawasan, maupun kajian mengenai daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Pada periode kunjungan tinggi, seperti libur Natal, Idulfitri, dan liburan sekolah, jumlah wisatawan meningkat secara signifikan tanpa diimbangi mekanisme pengendalian yang memadai. Akibatnya, tekanan terhadap lingkungan pesisir semakin besar, baik dalam bentuk peningkatan volume sampah, gangguan terhadap vegetasi pantai, maupun menurunnya kenyamanan wisatawan.

Aspek lain yang masih lemah adalah pendidikan lingkungan. Selama penelitian berlangsung, tidak ditemukan papan interpretasi lingkungan, program edukasi konservasi, maupun pemandu wisata yang mampu memberikan informasi mengenai pentingnya pelestarian ekosistem pesisir kepada pengunjung. Padahal, salah satu karakter utama ekowisata adalah menjadikan kegiatan wisata sebagai sarana pendidikan lingkungan yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi sumber daya alam.

Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal telah memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi kawasan wisata. Sebagian besar pedagang yang beroperasi di Pantai Natsepa merupakan masyarakat lokal dari Negeri Suli, Waiyari, dan wilayah sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata telah menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun demikian, keterlibatan tersebut masih terbatas pada aktivitas perdagangan dan belum berkembang menjadi partisipasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pengelolaan kawasan wisata secara kolaboratif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pantai Natsepa baru memenuhi sebagian kecil prinsip-prinsip ekowisata. Oleh karena itu, meskipun memiliki potensi alam yang besar, destinasi ini belum dapat dikategorikan sebagai destinasi ekowisata sejati karena aspek konservasi, pendidikan lingkungan, dan pengelolaan pengunjung belum menjadi bagian utama dalam sistem pengelolaan destinasi.

Pantai Natsepa sebagai Destinasi Wisata Ekonomis; Intepretasi Temuan Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Pantai Natsepa lebih tepat dikategorikan sebagai destinasi wisata ekonomis dibandingkan sebagai destinasi ekowisata. Temuan ini memiliki arti penting karena hingga saat ini masih banyak destinasi wisata berbasis alam yang secara langsung diberi label "ekowisata" hanya berdasarkan keberadaan sumber daya alamnya, tanpa mempertimbangkan apakah prinsip-prinsip dasar ekowisata benar-benar telah diterapkan dalam pengelolaannya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa orientasi utama pengelolaan Pantai Natsepa masih bertumpu pada peningkatan aktivitas ekonomi melalui kunjungan wisatawan. Aktivitas wisata didominasi oleh perdagangan kuliner, penyediaan jasa parkir, penyewaan fasilitas rekreasi, serta berbagai usaha kecil yang memberikan pendapatan kepada masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Namun demikian, manfaat tersebut belum diimbangi dengan program konservasi lingkungan, pendidikan ekologi, maupun sistem pengelolaan pengunjung yang merupakan karakteristik utama ekowisata.

Temuan ini memperkuat pandangan Goodwin, (1995) yang membedakan secara tegas antara wisata alam dan ekowisata. Goodwin menjelaskan bahwa tidak semua bentuk wisata berbasis alam dapat dikategorikan sebagai ekowisata. Ekowisata menuntut adanya komitmen nyata terhadap konservasi lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem pengelolaan destinasi. Sebaliknya, wisata alam lebih menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam sebagai objek rekreasi tanpa harus disertai kontribusi terhadap konservasi. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik pengelolaan Pantai Natsepa lebih mendekati konsep wisata alam atau wisata ekonomis sebagaimana dijelaskan oleh Goodwin.

Ketiadaan kebijakan pembatasan jumlah pengunjung semakin memperkuat interpretasi tersebut. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, konsep daya dukung lingkungan (*carrying*

capacity) merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah wisatawan dan kemampuan lingkungan dalam menerima tekanan akibat aktivitas wisata. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat kajian maupun kebijakan mengenai daya dukung lingkungan di Pantai Natsepa. Akibatnya, jumlah pengunjung terus meningkat pada musim liburan tanpa mekanisme pengendalian yang memadai sehingga berpotensi mempercepat degradasi lingkungan pesisir.

Meskipun demikian, orientasi ekonomi yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat dipandang sebagai suatu kegagalan pengelolaan. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai tahapan perkembangan destinasi wisata. Aktivitas pariwisata telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya usaha mikro yang menjadi penopang ekonomi lokal. Potensi ekonomi tersebut merupakan modal penting yang dapat menjadi dasar transformasi menuju pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa pengembangan Pantai Natsepa tidak perlu menghilangkan aktivitas ekonomi yang telah berkembang. Sebaliknya, kebijakan pengelolaan seharusnya mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan program konservasi lingkungan, pendidikan ekologis, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan jumlah pengunjung. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara wisata ekonomis dan ekowisata tidak bersifat saling bertentangan. Wisata ekonomis dapat dipandang sebagai tahap awal perkembangan suatu destinasi, sedangkan ekowisata merupakan bentuk pengelolaan yang lebih maju karena memerlukan komitmen kelembagaan yang lebih kuat terhadap konservasi lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Implikasi Kebijakan bagi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pengelolaan Pantai Natsepa maupun destinasi wisata pesisir lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Pertama, pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola destinasi wisata. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, pelaksanaan program kebersihan pantai secara berkala, peningkatan sistem pengelolaan limbah, serta pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas wisata terhadap ekosistem pesisir.

Kedua, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pengelolaan pengunjung yang didasarkan pada konsep daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Pembatasan jumlah pengunjung bukan dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas ekonomi, tetapi untuk memastikan bahwa intensitas kunjungan tetap berada dalam batas kemampuan lingkungan sehingga kualitas destinasi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui

sistem kuota kunjungan pada musim ramai, penerapan zonasi kawasan, sistem reservasi daring, maupun pemantauan berkala terhadap indikator lingkungan.

Ketiga, partisipasi masyarakat lokal perlu diperluas, tidak hanya sebagai pelaku usaha tetapi juga sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan konservasi, serta pengawasan kawasan wisata. Penguatan kelembagaan berbasis masyarakat akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap destinasi sekaligus memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Keempat, pendidikan lingkungan perlu menjadi bagian integral dari pengalaman wisata. Penyediaan papan interpretasi, pengembangan program edukasi lingkungan, pelatihan pemandu wisata lokal, serta kampanye konservasi akan meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Dengan demikian, kegiatan wisata tidak hanya memberikan manfaat rekreasi, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran mengenai pelestarian lingkungan.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa arah pengembangan Pantai Natsepa sebaiknya mengadopsi pendekatan tata kelola yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Fokus pengelolaan tidak lagi semata-mata pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada penciptaan destinasi yang berkelanjutan melalui integrasi tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis. Pendekatan tersebut akan memungkinkan Pantai Natsepa bertransformasi secara bertahap dari destinasi wisata ekonomis menuju destinasi ekowisata yang berkelanjutan tanpa menghilangkan manfaat ekonomi yang telah dirasakan oleh masyarakat lokal.

Kontribusi Teoritis Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam membedakan secara konseptual antara destinasi ekowisata dan destinasi wisata ekonomis. Selama ini, klasifikasi destinasi wisata berbasis alam sering kali lebih didasarkan pada karakteristik fisik kawasan, seperti keberadaan pantai, hutan, atau ekosistem alami. Akibatnya, banyak destinasi secara praktis diberi label sebagai ekowisata meskipun belum menerapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan konseptual ekowisata.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam yang menarik tidak secara otomatis menjadikan suatu destinasi sebagai ekowisata. Sebaliknya, status tersebut harus ditentukan berdasarkan sejauh mana pengelolaan destinasi mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi lingkungan, pendidikan ekologis, pengendalian jumlah pengunjung, partisipasi masyarakat lokal, serta tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan Fennell, (2003) dan Goodwin, (1995) bahwa perbedaan utama antara wisata alam dan ekowisata terletak pada model pengelolaannya, bukan semata-mata pada jenis sumber daya yang dimanfaatkan.

Selain itu, penelitian ini mengusulkan bahwa konsep wisata ekonomis dapat dipahami sebagai tahapan perkembangan destinasi wisata berbasis alam yang masih berorientasi pada

pemanfaatan ekonomi, sedangkan ekowisata merupakan bentuk pengelolaan yang lebih matang karena telah mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan konservasi lingkungan secara seimbang. Perspektif ini memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam mengevaluasi transformasi destinasi wisata menuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Kontribusi lainnya adalah penyediaan bukti empiris dari konteks destinasi wisata pesisir di Indonesia, khususnya Pantai Natsepa. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas konsep ekowisata pada kawasan konservasi atau taman nasional, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap prinsip-prinsip ekowisata juga relevan diterapkan pada destinasi wisata pesisir yang selama ini berkembang sebagai kawasan wisata rekreasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan teori ekowisata ke dalam konteks pengelolaan destinasi pesisir yang menghadapi tekanan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi menuju ekowisata tidak cukup dilakukan melalui perubahan nomenklatur atau strategi pemasaran destinasi, tetapi memerlukan perubahan mendasar dalam sistem tata kelola, kebijakan konservasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan pengunjung. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pengelola destinasi dalam menilai kesiapan suatu kawasan untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan Pantai Natsepa telah memenuhi prinsip-prinsip ekowisata atau masih lebih mencerminkan karakteristik wisata ekonomis. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis terhadap komponen produk wisata serta prinsip-prinsip ekowisata, penelitian ini menunjukkan bahwa Pantai Natsepa memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang tinggi, terutama melalui keindahan pesisir serta kekhasan kuliner lokal yang menjadi daya tarik utama destinasi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Natsepa belum memenuhi sebagian besar prinsip dasar ekowisata. Aspek konservasi lingkungan, pendidikan ekologis, pengelolaan jumlah pengunjung berdasarkan daya dukung lingkungan, serta tata kelola kolaboratif belum diimplementasikan secara optimal. Sebaliknya, orientasi pengelolaan masih didominasi oleh aktivitas ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan kegiatan usaha masyarakat.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Pantai Natsepa lebih tepat dikategorikan sebagai destinasi wisata ekonomis daripada destinasi ekowisata. Penelitian ini menegaskan bahwa klasifikasi suatu destinasi wisata berbasis alam tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan sumber daya alam, tetapi harus dievaluasi berdasarkan implementasi prinsip-prinsip konservasi, pendidikan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola destinasi yang

berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai perbedaan konseptual antara wisata ekonomis dan ekowisata dalam konteks pengelolaan destinasi wisata pesisir di Indonesia.

IMPLIKASI

Penelitian ini memperkuat teori ekowisata yang dikemukakan oleh Fennell, (2003) dan Goodwin, (1995) dengan menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam yang menarik bukanlah indikator yang cukup untuk mengategorikan suatu destinasi sebagai ekowisata. Temuan penelitian menegaskan bahwa dimensi tata kelola, konservasi lingkungan, pendidikan ekologis, pengelolaan pengunjung, dan partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental yang menentukan status suatu destinasi sebagai ekowisata. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa wisata ekonomis dapat dipandang sebagai tahapan perkembangan destinasi yang berpotensi bertransformasi menuju ekowisata apabila didukung oleh perubahan tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan pengelola Pantai Natsepa, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma pengelolaan destinasi. Pengembangan wisata tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan daerah, tetapi juga harus mengintegrasikan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan bagi wisatawan, pengendalian jumlah pengunjung berdasarkan daya dukung kawasan, serta penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan destinasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas destinasi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dalam jangka panjang.

Hasil penelitian memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi wisata pesisir. Kebijakan yang direkomendasikan meliputi penyusunan standar pengelolaan ekowisata, penerapan kajian daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), penguatan sistem pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas interpretasi lingkungan, pembentukan kelembagaan pengelola berbasis masyarakat, serta penyusunan regulasi mengenai pembatasan jumlah pengunjung pada periode kunjungan tinggi. Implementasi kebijakan tersebut akan mendukung transformasi Pantai Natsepa menuju destinasi wisata yang lebih berkelanjutan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu destinasi wisata pesisir, yaitu Pantai Natsepa, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh destinasi wisata pesisir di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda.

Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan yang dihasilkan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pengelolaan destinasi daripada pengukuran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan implementasi prinsip-prinsip ekowisata.

Ketiga, penelitian belum melakukan analisis kuantitatif mengenai daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*), kapasitas sosial (*social carrying capacity*), maupun dampak ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas wisata terhadap masyarakat lokal. Oleh karena itu, beberapa aspek pengelolaan destinasi masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif melalui pendekatan multidisiplin.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah dan pengelola Pantai Natsepa perlu mengarahkan kebijakan pengelolaan destinasi pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan program konservasi lingkungan, penyediaan sarana pengelolaan sampah yang memadai, penerapan sistem pembatasan jumlah pengunjung berdasarkan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), serta pengembangan program pendidikan lingkungan bagi wisatawan. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal perlu diperluas, tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mitra dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan destinasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sehingga Pantai Natsepa dapat bertransformasi secara bertahap menuju destinasi ekowisata yang berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai pengelolaan destinasi wisata pesisir dikembangkan melalui pendekatan komparatif pada beberapa destinasi dengan karakteristik yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip ekowisata di Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur hubungan antara tata kelola destinasi, daya dukung lingkungan, partisipasi masyarakat, kepuasan wisatawan, dan keberlanjutan pariwisata. Selain itu, pengembangan model transformasi destinasi wisata ekonomis menuju ekowisata melalui pendekatan *collaborative governance* menjadi agenda penelitian yang penting untuk memperkaya pengembangan teori dan praktik pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuhari, Z., Abdullah, S. I. N. W., Bachok, S., & Ibrahim, M. (2023). Systematic Literature Review on Methods of Assessing Carrying Capacity in Recreation and Tourism Destinations. *Sustainability*, 15(4), 3474. <https://doi.org/10.3390/su15043474>
- Buckley, R. (2003). *Case Studies in Ecotourism*. Oxon, UK: CABI Publishing. <https://doi.org/10.1079/9780851996653.0000>
- Butler, R. W. (2020). Tourism Carrying Capacity Research: A Perspective Article. *Tourism Review*, 75(1), 207–211. <https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0194>
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Andi.
- Fennel D. A. (2002). *Ecotourism Programme Planning*. Wallingford, UK: CABI Publishing. <https://doi.org/10.1079/9780851996103.0000>
- Fennell, D. A. (2003). *Ecotourism: An Introduction*. 2nd Edition. Routledge: London. <https://doi.org/10.4324/9780203505434>

-
- G. Sudarto 1998, Ekowisata (Ecotourism) Wahana Kegiatan Ekonomi yang Berkelanjutan
- Goodwin, H. (1995). *Tourism and the environment*. Biologist, 42(3):129–133
- Hetzer, N.D. (1965). *Environment, Tourism, Culture*; reprinted in *Ecosphere* 1(2):1–3
- Inskeep. (1991). *Tourism Planning an Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: *International Journal of Business and Social Science*, 4 (12), 123-127
- Li, J., Zhang, L., Meng, F., & Zhang, H. (2021). A Scientometric Review of Tourism Carrying Capacity Research. *Journal of Cleaner Production*, 325, 129278. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129278>
- Regina butar butar 2021, Ekowisata Dalam Perspektif Ekologi dan Konservasi, Widina Bhakti Persada Bandung
- Tafalas, M. (2010). Dampak Pengembangan Ekowisata Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Ekowisata Bahari Pulau Mansuar). Institut Pertanian Bogor.
- Tafalas, M. (2010). *Ekowisata*. Balai Pustaka.
- Ubjaan Jusak & Sipahelut S.W., (2022). Persepsi Wisatawan pada City Branding Kota Kecil (Studi pada Kota Tual, Provinsi Maluku), *Syntax Literature*, 7(1), 15513-15531, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.9961>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata